

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan menjadi salah satu isu kebijakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat.<sup>1</sup> Masyarakat yang miskin berarti masyarakat yang tidak berdaya (*less powerful*) memenuhi standar hidup layak, baik pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, dan kebutuhan budaya.<sup>2</sup> Ketidakberdayaan masyarakat, terkadang disebabkan oleh faktor-faktor internal yang membelit diri. Ada pula disebabkan karena ketidakadilan untuk mendapatkan akses dan aset dari kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Oleh karena itu, keadaan miskin yang dialami masyarakat perlu ditanggulangi dengan menjadikan masyarakat itu berdaya.

Keluarga miskin sering menimbulkan siklus kemiskinan. Fenomena menunjukkan bahwa keluarga miskin memiliki banyak anggota keluarga. Anggota keluarga yang banyak dan tidak mendapatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan sehingga anak-anak dari keluarga miskin kecenderungan menjadi keturunan yang miskin, dan seterusnya. Hal itu dikarenakan akses orang miskin terhadap pendidikan sangat rendah. Asumsinya, program pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan melalui penekanan ledakan penduduk dengan menciptakan

---

<sup>1</sup>Prabawa Eka Soesanta, *Jurnal Berdaya Media Informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa* (Jakarta: Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri, 2012), Vol. X No. 4 April 2012, h. 30

<sup>2</sup>Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), h. 5

keluarga kecil dan ideal. Thomas Robert Malthus<sup>3</sup> meyakini jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan maka suatu saat nanti sumber daya alam akan habis, sehingga muncul wabah penyakit, kelaparan, dan berbagai macam penderitaan manusia.

Robert Chambers mengemukakan definisi dan konsep kemiskinan lebih lengkap. Dia menjelaskan bahwa inti masalah kemiskinan sebenarnya terletak pada perangkap kemiskinan (*deprivations trap*). Ada lima perangkap kemiskinan menurut Chambers, yaitu kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan atau kadar isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan.<sup>4</sup> Perangkap kemiskinan ini lebih dikenal dengan lingkaran setan kemiskinan yang sangat berbahaya dan mematikan peluang hidup orang/kelompok miskin.

Pengentasan kemiskinan melalui proses pemberdayaan memberi penekanan pentingnya pembelajaran atau pendidikan bagi masyarakat miskin. Soedjatmoko<sup>5</sup> menyebutkan, ada suatu proses yang seringkali dilupakan bahwa pembangunan adalah pembelajaran sosial (*social learning*). Pemberdayaan masyarakat tidak sekedar pemberian dari pihak yang memiliki sesuatu kepada pihak yang tidak memiliki melainkan adanya transfer pengetahuan kepada masyarakat. Dengan pengetahuan itu diharapkan mereka dapat menyadari kondisi

---

<sup>3</sup>Thomas Robert Malthus, *Essay On The Principle of Populations* (London, Joseph Johnson, 1798). Junaidi, "Penduduk dan Pembangunan Ekonomi (2)," <https://junaidichaniago.wordpress.com/tag/artikel/page/3/> (akses 15 Maret 2014).

<sup>4</sup>Robert Chambers, *Pembangunan Desa, Mulai Dari Belakang* (Jakarta: LP3ES, 1987) dalam Yulianto Kadji, *Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya*, <https://www.google.co.id/?gwsrd=cr,ssl&ei=ji6VceIM4S2mQWI0Ie4Ag#q=robert+chamber+tentang+kemiskinan>

<sup>5</sup><http://green-leean.blogspot.com/2011/01/teori-dan-konsep-dasar-pengembangan.html>

yang sedang membelitnya, sehingga kelompok miskin secara aktif dan mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya.

Guhardja mengusulkan perlunya mengelompokkan sasaran dalam proses pendidikan masyarakat.

Pendidikan masyarakat di pedesaan diutamakan pada peningkatan kemampuan keluarga untuk mengelola dan mendayagunakan sumber daya keluarga secara tepat. Kelompok sasaran diutamakan pada kelompok strategis seperti petani dan buruh tani, nelayan, buruh, wanita, pemuda, pemuka masyarakat, dan pemimpin informal lainnya.<sup>6</sup>

Pemikiran Guhardja memberikan sinyal bahwa dalam proses pemberdayaan dipandang sebagai *social learning*, harus jelas segmen atau kelompok yang diberdayakan itu. Komite Penanggulangan Kemiskinan,<sup>7</sup> mengartikan pemberdayaan harus dimulai dari rumah tangga atau keluarga. Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik dan psikologis. Pemberdayaan sosial maksudnya usaha bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan keterampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan. Selanjutnya, pemberdayaan politik adalah usaha bagaimana rumah tangga yang lemah memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan publik yang memengaruhi masa depan mereka. Pemberdayaan psikologis adalah usaha bagaimana membangun kepercayaan diri rumah tangga yang lemah.

---

<sup>6</sup>Suprihatin Guhardja, *et al*, *Pengembangan Sumber Daya Keluarga* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1993), h. 93-94

<sup>7</sup>Komite Penanggulangan Kemiskinan, *Buku Pedoman Komite Penanggulangan Kemiskinan* (Jakarta: Sekretariat Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2002).

Ada dua alasan mengapa keluarga sebagai institusi sosial terkecil yang perlu diberdayakan, yaitu keluarga tempat tumbuh dan berkembangnya individu yang kelak menentukan kualitas individu dan pada keluarga aktivitas pertama individu berlangsung. Standar sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Ayah menduduki posisi sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara materi (lahir) dan immateri (batin). Terkadang pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, sehingga keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangganya secara layak. Jika kondisi ini dibiarkan, lama-lama mereka menjadi beban sosial. Padahal di sisi lain, ibu (istri) punya peluang untuk berusaha untuk membantu beban keluarga. Perempuan tidak hanya memiliki peran domestik sebagai pendamping suami dan membesarkan anak-anak, namun seiring dengan dinamika masyarakat kaum perempuan memiliki peran luas. Oleh karena itu, kelompok wanita atau ibu-ibu menjadi target pemberdayaan keluarga miskin di era dewasa ini.

Harmona Daulay<sup>8</sup> menyebutkan bahwa pendekatan pemberdayaan perempuan dianggap suatu strategi yang melihat perempuan bukan sebagai beban pembangunan melainkan potensi yang harus dimanfaatkan untuk menunjang proses pembangunan. Pendekatan pemberdayaan (*empowerment*) menginginkan perempuan mempunyai kontrol terhadap beberapa sumber daya materi dan

---

<sup>8</sup>Harmona Daulay, *Pemberdayaan Perempuan: Studi Kasus Pedagang Jamu di Gedung Johor Medan* (Medan: Jurnal Harmoni Sosial, 2006), Volume I Nomor I, h. 10

nonmateri yang penting dan pembagian kembali kekuasaan di dalam maupun di antara masyarakat<sup>9</sup>

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mengatasi hambatan guna mencapai pemerataan atau persamaan bagi laki-laki dan perempuan pada setiap tingkat proses pembangunan. Menurut Novian<sup>10</sup> pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

Pemberdayaan perempuan tidak hanya berpaku pada kegiatan di sektor ekonomi, tetapi juga memberikan pemahaman kepada perempuan untuk meningkatkan kualitas keluarga. Kualitas keluarga yang dimaksud dengan membentuk keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Bagi keluarga miskin, dengan membentuk keluarga kecil maka beban keluarga pun kecil. Dengan beban keluarga yang kecil sehingga kemungkinan untuk memenuhi standar hidup layak sangat besar.

---

<sup>9</sup>Caroline O.N Moser, *The Asset Vulnerability Framework: Reassessing Urban Poverty Reduction Strategies World Development*, (1998), h. 1-19

<sup>10</sup>Budhy Novian, *Sekilas Tentang Pemberdayaan Perempuan* (Kepulauan Bangka Belitung: Artikel Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pangkalpinang, 2010) dalam Riyan Ikhrallah, "Pemberdayaan Perempuan Sebagai Upaya Optimalisasi Sumber Daya Manusia untuk Menuju Pembangunan Berkelanjutan," <http://masriyanikhram.blogspot.com/2014/03/pemberdayaan-perempuan-sebagai-upaya.html> (akses 27 Maret 2014)

Mencermati pentingnya pemberdayaan perempuan dewasa ini, perlu dilakukan kajian terhadap program pemberdayaan perempuan, apakah pemberdayaan hanya dalam teori atau dapat direalisasikan dengan baik. Pada tesis ini, penulis hendak mengkaji dan mengungkap program pemberdayaan perempuan yang tergabung dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Pasaman. Kelompok UPPKS merupakan salah satu bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah dengan sasaran kelompok keluarga miskin. UPPKS program yang diintegrasikan dengan program Keluarga Berencana (KB), sehingga kondisi ekonomi keluarga meningkat seiring terciptanya keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Tanpa kondisi ekonomi yang baik, mustahil keluarga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

UPPKS merupakan program dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang mana lembaga pelaksana teknis di Kabupaten Pasaman berstatus badan, yaitu BPPKB. Sugiri Syarif<sup>11</sup> menyebutkan bahwa kelompok UPPKS dimulai sejak tahun 1976 melalui program *Community Incentive Project* (CIP). Pelaksanaan CIP dengan pendekatan pembangunan desa secara keseluruhan dan memberikan berbagai ragam insentif bagi masyarakat pedesaan atas prestasi kesertaan ber-KB. Insentif yang diterima masyarakat peserta KB seperti bangunan MCK keluarga, pembuatan sarana jalan, sarana air bersih, dan

---

<sup>11</sup>Sugiri Syarif, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Kelompok UPPKS* (Jakarta: BKKBN, 2010), h. 61

bantuan modal kerja. Pada tahun 1979, program CIP dikembangkan melalui pendekatan kelompok dengan penyediaan modal kerja bagi kelompok-kelompok akseptor. Sumber modal untuk kelompok itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Donor Internasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kalangan swasta.

Kegiatan tersebut kemudian dikenal dengan nama kegiatan Peningkatan Pendapatan Keluarga (P2K) atau *Income Generating*. Program Peningkatan Pendapatan Keluarga lebih dikenal dengan nama Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Kemudian dari itu, pada awal tahun 1990, UPPKA diubah menjadi UPPKS dengan cakupan yang lebih luas, antara lain dengan melibatkan pasangan usia subur yang belum menjadi akseptor, keluarga prasejahtera (miskin), keluarga sejahtera I dan keluarga yang peduli dengan program keluarga berencana. Pada kelompok UPPKS, para anggota dilatih untuk berwirausaha dengan kekuatan bersama antar anggota. Semua anggota dapat meningkatkan wawasan dan kapasitas diri kemudian berkreasi bersama. Tidak boleh satupun anggota yang mendominasi pada kelompok, karena pembagian tugas harus seimbang. Dengan demikian, apabila terjadi resiko pada usaha kelompok diharapkan dapat ditanggung secara bersama.

Adapun ukuran keberhasilan kelompok UPPKS dalam buku pedoman pengelolaan dan pengembangan kelompok UPPKS yang dikeluarkan oleh BKKBN adalah.

1. Meningkatnya kesertaan dan kemandirian ber-KB pada anggota kelompok UPPKS terutama keluarga prasejahtera dan sejahtera 1

2. Meningkatnya jumlah anggota keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 untuk tergabung dalam kegiatan kelompok UPPKS
3. Meningkatnya jumlah kegiatan dan beragamnya jenis usaha kelompok
4. Meningkatnya kualitas produksi usaha kelompok UPPKS
5. Meningkatnya tahapan kesejahteraan anggota kelompok UPPKS
6. Meningkatnya dinamika anggota kelompok UPPKS<sup>12</sup>

Peran pemerintah dalam mewujudkan kedinamikaan dan kesejahteraan kelompok UPPKS, dengan memfasilitasi keberlangsungan kelompok UPPKS dan melakukan pembinaan-pembinaan. Dalam buku pedoman pelaksanaan kelompok UPPKS, ada enam agenda pembinaan yang dapat dilakukan oleh fasilitator, yaitu:

1. Pembinaan organisasi
2. Pembinaan permodalan
3. Pembinaan usaha ekonomi produktif
4. Pembinaan administrasi dan pembukuan
5. Pembinaan pemasaran
6. Pembinaan kesertaan ber-KB<sup>13</sup>

Hasil interview awal penulis dengan Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasaman,<sup>14</sup> ada dua agenda pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman melalui BPPKB, dalam memberdayakan kelompok UPPKS, yaitu pemberdayaan dari segi permodalan dan memberikan pelatihan. Tahun 2013, BPPKB menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman dalam pemberian modal usaha kepada 25 kelompok UPPKS dan pemberian bantuan modal atas kerja sama dengan BAZNAS ini dilanjutkan tahun 2014 sebanyak 15 kelompok. Pihak BPPKB mengklaim telah melakukan pemberdayaan terhadap kelompok UPPKS sesuai

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 98

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 95-96

<sup>14</sup>Siti Khadijah, Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman, di Lubuk Sikaping, *Wawancara Langsung*, 24 Juli 2014.



dengan buku panduan. Di sisi lain, perkembangan kelompok UPPKS tidak merata. Data dari BPPKB<sup>15</sup> menunjukkan terjadinya kemunduran perkembangan kelompok UPPKS. Kemunduran yang dimaksud, terjadinya penurunan kuantitas kelompok. Pada tahun 2013, terdapat 117 kelompok UPPKS, sedangkan pada tahun 2014 terdapat 56 kelompok UPPKS. Penyebab kemunduran itu, disebabkan oleh ketahanan kelompok. BPPKB merilis penurunan jumlah kelompok UPPKS itu setelah dilakukan pendataan ulang. Dari pendataan itu, terdapat permasalahan yang membelit kelompok UPPKS yaitu banyaknya keanggotaan kelompok sudah pecah kongsi, kelompok tidak memiliki pengurus, tidak jalan usaha kelompok, tidak mempunyai informasi tentang bentuk dan akses modal, rendahnya kemampuan dalam mengelolah modal, pemetaan usaha tidak jelas, kemasan dan pemasaran produk tidak kejar pangsa pasar serta akses informasi yang tidak memadai.

Pada konsepnya, pemerintah daerah harus melakukan pembinaan-pembinaan terhadap kelompok UPPKS dengan memberikan pemantapan terhadap kedinamikaan kelompok dan kesejahteraan kelompok. Pembinaan terhadap kedinamikaan kelompok bertujuan memperkuat kelompok sehingga para anggota memiliki daya saing dan kemandirian. Demikian juga dengan pembinaan kelompok dalam peningkatan kesejahteraan, mulai dari peningkatan kapasitas anggota, mengembangkan usaha, dan akhirnya meningkatkan pendapatan para anggota. Kelompok yang kuat adalah kelompok yang mandiri dan dinamis dalam

---

<sup>15</sup>BP2KB Pasaman, *Hasil Pendataan Keluarga di Kabupaten Pasaman Tahun 2014* (Pasaman, BPPKB, 2014).

merespon lingkungan. Agus Sjafari<sup>16</sup> menyebutkan kekuatan kelompok sangat ditentukan oleh aspek-aspek internal kelompok dan organisasional antara lain; kepemimpinan kelompok, dinamika kelompok yang tinggi, komunikasi kelompok yang intensif dan masih banyak lagi faktor lain yang menentukan karakteristik kelompok. Apabila semua aspek tersebut berjalan dengan kondusif maka akan menjamin adanya keberdayaan yang tinggi.

Pemberdayaan keluarga miskin di Kabupaten Pasaman, yang tergabung dalam kelompok UPPKS ini sangat penting untuk menjadi pertimbangan pemerintah daerah. Keluarga yang bergabung dalam kelompok UPPKS itu, keluarga miskin yang juga menjadi peserta aktif program KB. Jadi, dengan melakukan pemberdayaan terhadap kelompok UPPKS, keluarga miskin dibina untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Pada sisi lain, persoalan kependudukan di Kabupaten Pasaman, dengan jumlah penduduk sangat besar mencapai 263.800 jiwa menjadi faktor penyumbang kemiskinan itu sendiri. Kabupaten Pasaman memiliki 46.311 kepala keluarga termasuk Pasangan Usia Subur (64,9%) dan sebanyak 23.876 kepala keluarga berada pada status keluarga sangat miskin dan miskin. Inilah yang membuat kegelisahan dan ancaman kemiskinan di Kabupaten Pasaman. Jika program pemberdayaan terhadap kelompok UPPKS berjalan dengan baik maka laju kemiskinan berkurang jumlahnya secara nyata dan bukan pada angka-angka semata.

---

<sup>16</sup>Agus Sjafari, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 7

Berdasarkan penjelasan di atas, pemberdayaan kelompok UPPKS merupakan model yang perlu untuk dilakukan dalam memberdayakan keluarga miskin yaitu melalui pendekatan kelompok. Asumsinya, setiap keluarga pada dasarnya berkelompok dengan keluarga yang lain, baik berdasarkan kedaerahan, berdasarkan kelompok kerja, berdasarkan kebutuhan dan kepentingan, berdasarkan ikatan agama dan berdasarkan ikatan-ikatan lainnya. Bagi keluarga miskin sebagai anggota kelompok bekerja melalui kelompok akan melatih keluarga miskin tersebut untuk mengambil keputusan yang dianggap baik, khususnya terkait dengan bagaimana meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pertanyaannya, apakah konsep kelompok UPPKS sudah dipenuhi oleh kelompok-kelompok yang dibentuk oleh BPPKB, dan apakah proses pemberdayaan terhadap kelompok UPPKS itu sudah berjalan dengan benar. Dewasa ini, kata-kata pemberdayaan seringkali dilekatkan dengan banyak program yang dianggap telah usang. Adakalanya langkah tersebut berhasil menggerakkan kembali program yang usang itu, namun seringkali program tersebut mengalami kegagalan. Kegagalan melaksanakan program pemberdayaan, karena kurang memahami pemberdayaan itu sendiri.

Pada tesis ini, penulis menggunakan konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh Jim Ife untuk mengungkapkan pelaksanaan program pemberdayaan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terhadap kelompok UPPKS. Menurut Jim Ife dalam Nanang

Martono,<sup>17</sup> mengemukakan pengertian pemberdayaan sebagai berikut, *“Empowerment means providing people with the resources, opportunities, knowledge, and skill to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and effect of their community.* Pendapat Jim Ife di atas, mengartikan pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat itu dalam menentukan masa depan mereka serta untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Pendapat Jim Ife tersebut, ada empat item penting yang harus diperhatikan dalam program pemberdayaan, yaitu menyiapkan sumber daya, pengetahuan, kesempatan dan keterampilan.

Nanang Martono membagi pemberdayaan menjadi dua, yaitu pemberdayaan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan, tidak bisa diabaikan begitu saja. Pemberdayaan dikatakan sebagai sebuah proses adalah kegiatan memperkuat keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Cara yang ditawarkan Jim Ife untuk memperkuat keberdayaan tersebut adalah dengan menyiapkan sumber daya, memberikan kesempatan, pengetahuan dan keterampilan agar kapasitas masyarakat itu meningkat. Sementara itu, pemberdayaan dikatakan sebagai tujuan dengan merujuk pada hasil yang ingin dicapai, yaitu kelompok atau masyarakat menjadi berdaya. Masyarakat yang

---

<sup>17</sup>Agus Sjafari dan Kandung Sapto Nugroho, *Perubahan Sosial: Sebuah Bunga Rampai* (Serang: FISIP Untirta, 2012), h. 12

berdaya adalah masyarakat yang memiliki kapasitas diri dan berpartisipasi dalam menentukan masa depan.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana pemberdayaan kelompok UPPKS dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya, penulis ingin mendalami melalui penelitian ilmiah berbentuk tesis dengan judul, ***“Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Pasaman.”***

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pemberdayaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Pasaman?

### **2. Batasan Masalah**

Untuk lebih fokusnya penelitian ini, maka penulis membatasi rumusan masalah di atas, yaitu:

- a. Pemberdayaan dalam menyiapkan sumber daya pada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.
- b. Pemberdayaan dalam memberikan pengetahuan pada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.

- c. Pemberdayaan dalam memberikan kesempatan pada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.
- d. Pemberdayaan dalam memberikan keterampilan pada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengungkap proses penyiapan sumber daya pada kelompok UPPKS dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- b. Untuk mengungkap proses pemberian pengetahuan pada kelompok UPPKS dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- c. Untuk mengungkap proses pemberian kesempatan pada kelompok UPPKS dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- d. Untuk mengungkap proses pemberian keterampilan pada kelompok UPPKS dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Menambah wawasan bagi penulis, pemerintah daerah, leading sektor terkait, mitra usaha, dan seluruh pembaca tentang program pemberdayaan kelompok UPPKS dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kkeluarga di Kabupaten Pasaman.

- b. Menambah rujukan alternatif bagi pemerintah daerah, leading sektor terkait, mitra usaha, dan seluruh pembaca tentang program pemberdayaan kelompok UPPKS dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kkeluarga di Kabupaten Pasaman.
- c. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang akademis, khususnya bagi lembaga pemerintahan dan swasta serta mitra usaha dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Apalagi buku rujukan tentang UPPKS sangat terbatas.
- d. Sebagai acuan dan referensi bagi para peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lanjutan tentang pemberdayaan kelompok atau masyarakat.

#### **D. Penjelasan Judul**

Penjelasan judul berisikan penjelasan rinci dari konsep judul yang masih abstrak. Definisi operasional merupakan rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan. Tujuan penjelasan judul agar penjelasan dan pembahasan yang diberikan peneliti tidak lari dari konsep yang sudah dipilihnya. Bagi pembaca, dapat mengerti dan mengetahui bahwa variabel-variabel yang diteliti dalam sebuah penelitian, yang juga menggambarkan alat ukur variabel.

Ada beberapa kata kunci yang perlu dijelaskan terkait dengan judul tesis ini, yaitu pemberdayaan adalah proses menyiapkan kepada masyarakat sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan

kapasitas diri masyarakat itu dalam menentukan masa depan mereka serta untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.

Kelompok UPPKS adalah kelompok yang di bawah binaan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk meningkatkan pendapatan dari keluarga miskin yang ikut program keluarga berencana. Kelompok UPPKS dibina oleh BP2KB di Kabupaten Pasaman. Kesejahteraan maksudnya kondisi orang/kelompok yang membaik secara materi dan non materi. Kesejahteraan merujuk pada tujuan-tujuan dari perumus program UPPKS yang dijadikan ukuran keberhasilan kelompok UPPKS tersebut. Kabupaten Pasaman adalah salah satu daerah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan ibukota Lubuk Sikaping.

Jadi, pemberdayaan kelompok UPPKS di Kabupaten Pasaman maksudnya adalah upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasaman melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai penyelenggara teknis program maupun upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh dan untuk kelompok UPPKS itu sendiri.

#### **E. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Dari pengamatan penulis terhadap penelitian terdahulu yang membahas tentang kemiskinan, ditemukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis. Pertama, Tim Pelaksana Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan



Perekayasa, 2012, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan judul Aksesibilitas Modal Di Kalangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Dalam Meningkatkan Usaha Kelompok Di Kabupaten Gresik Dan Malang Provinsi Jawa Timur.<sup>18</sup> Dengan mengambil sampel terhadap 30 kelompok UPPKS di masing-masing kabupaten, dengan metode mix kuantitatif- kualitatif.

Masalah penelitian dipecah menjadi empat pertanyaan. Yaitu, bagaimana pola pengorganisasian pada kelompok UPPKS sehingga mudah dalam mendapatkan aksesibilitas permodalan? Apa saja kiat-kiat yang dilakukan kelompok UPPKS sehingga mudah mendapatkan akses modal? Bagaimana proses kegiatan usaha UPPKS mendapatkan aksesibilitas permodalan? Dukungan institusi mana saja yang berperan terhadap keberhasilan kelompok UPPKS?

Hasil penelitian menemukan, temuan kuantitatif dan kualitatif menunjukkan keberadaan SK pembentukan kelompok, punya usaha ekonomi produktif, dan ada instansi yang memfasilitasi penting dan merupakan syarat untuk mendapat modal. Dukungan institusi untuk keberhasilan kelompok: penyediaan modal, pendampingan permodalan, pendampingan dalam proses produksi, pelatihan, pemasaran. Kabupaten Malang, Peran AKU sebagai fasilitator dapat menjembatani pertemuan antara kelompok dengan sumber modal. Sedangkan di Kabupaten Gresik disimpulkan peran BUMDes lebih diperkuat dan difungsikan sebagai wadah atau muara dari berbagai sumber pinjaman modal.

---

<sup>18</sup>Iswarati, *Aksesibilitas Modal Di Kalangan Kelompok UPPKS Dalam Meningkatkan Usaha Kelompok di Kabupaten Gresik dan Malang Provinsi Jawa Timur* (Jakarta: Tim Pelaksana Insentif PKPP BKKBN, 2012), h. 1-10.

Penelitian kedua dilakukan oleh Vera Ari Kurniasih<sup>19</sup> dengan judul Pelaksanaan Program UPPKS Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga oleh Badan PP, PA dan KB Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan program UPPKS Kabupaten Karanganyar dari tiga kategori, pendataan, pendanaan, dan pelaporan. Peneliti menyimpulkan bahwa kelompok UPPKS belum menguasai teknik pendataan, apalagi update data berbasis online. Sehingga data tentang kelompok dan laporan kegiatan tidak disimpan dalam penyimpanan data yang berteknologi.

Dua penelitian yang ditemukan penulis, mungkin masih banyak lagi hasil-hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang ekonomi keluarga, peranan perempuan dalam menupang ekonomi keluarga, kemiskinan, dan UPPKS. Akan tetapi, tiga penelitian yang penulis kemukakan tentu saja berbeda dengan penelitian yang penulis ajukan. Perbedaan mendasar adalah rumusan masalah, teori pendukung, dan metodologi penelitian yang digunakan. Selain perbedaan tersebut, yang pastinya penelitian terdahulu berbeda soal waktu, tempat dan objek penelitian.

---

<sup>19</sup>Vera Ari Kurniasih, “Pelaksanaan Program UPPKS Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga oleh Badan PP, PA dan KB Kabupaten Karanganyar,” [http://digilib.uns.ac.id/abstrak\\_16090\\_pelaksanaan-program-uppks-sebagai-upaya-peningkatan-pendapatan-keluarga-oleh-badan-pp,-pa-dan-kb-kabupaten-karanganyar.html](http://digilib.uns.ac.id/abstrak_16090_pelaksanaan-program-uppks-sebagai-upaya-peningkatan-pendapatan-keluarga-oleh-badan-pp,-pa-dan-kb-kabupaten-karanganyar.html) (akses 17 Maret 2014).

## **F. Sistematika Penulisan**

Teknik penulisan proposal ini mengacu kepada teknik penulisan yang berlaku di IAIN Imam Bonjol Padang.<sup>20</sup> Untuk lebih terarah dan fokusnya pembahasan penelitian ini, penulis membuat sistematika penulisan yang terbagi menjadi beberapa bab dan setiap bab penulis perinci menjadi beberapa sub bab.

Gambaran umum sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah:

### **Bab I Pendahuluan**

Berisikan gambaran mengenai latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

### **Bab II Landasan Teoritis dan Kerangka Konseptual**

Pada bab landasan teoritis ini penulis menjelaskan teori-teori yang penting. Yaitu, kemiskinan dan pemberdayaan dan bias-biasnya, Kerangka konseptual merupakan pemaparan teori-teori yang ada kaitannya dengan indikator, yaitu penyiapan sumber daya, pemberian pengetahuan, pemberian kesempatan, dan pemberian keterampilan.

### **Bab III Metodologi Penelitian**

Pada bab ini penulis mengemukakan metode dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis dan pengolahan data, dan penarikan kesimpulan.

### **Bab IV Gambaran Umum Penelitian**

---

<sup>20</sup>Syafruddin, *et al*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Imam Bonjol Padang* (Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 2014), h. 77-82.

Pada bab iv ini, dikemukakan hasil penelitian berupa gambaran umum daerah penelitian dan deskripsi kelompok UPPKS di Kabupaten Pasaman.

### **Bab V Hasil Penelitian**

Pada bab ini, dikemukakan hasil penelitian berupa pemaparan data dan analisis data penelitian.

### **Bab VI Kesimpulan dan Saran**

Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang bersifat membangun dan berguna bagi pembaca, khususnya pemerintah daerah, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana selaku instansi penggerak pemberdayaan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok UPPKS.